

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JALUR DOMISILI PADA SISTEM PENERIMAAN
MURID BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI SMPN 143 JAKARTA
UTARA**

Rafelia Ramadhania, Sri Suwitri

**Program Studi S1 Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Email: fisip@undip.ac.id**

ABSTRACT

The New Student Admissions System (SPMB) in North Jakarta has used a zoning system as an effort to equalize access to education, bring students' residences closer to schools and eliminate the stigma of favorite schools. The implementation of this policy is based on Minister of Education and Culture Regulation Number 1 of 2021 and changed its name based on Minister of Education and Culture Regulation Number 3 of 2025 concerning the New Student Admission System, however there are still obstacles in the policy implementation process. The aim of this research is to analyze the implementation of the SPMB policy for the State Junior High School zoning system in North Jakarta and identify supporting and inhibiting factors for the implementation of this policy using the theory of public policy implementation according to Grindle and Van Meter and Van Horn. Data collection techniques were carried out using interviews, observation and literature studies through primary and secondary data sources as well as qualitative analysis. The results of this research show that policy implementation has been implemented but has not run optimally, as indicated by the existence of some people who choose schools based on the school's academic achievement, school reputation and school facilities. The supporting factors in implementing this policy are related to the policy targets, availability of resources, communication between organizations, characteristics of implementing agents and the attitudes of policy implementers. However, economic, social, and political conditions in the community and communication between organizations related to the manipulation of Family Card data so that the distribution of public school education is uneven & the lack of learning motivation of students who graduate through the domicile path with an older age than other paths. Researchers recommend optimizing socialization to the community, continuing efforts to improve education by the local government together with schools in facilitating facilities and infrastructure, human resources, and school management.

Keywords: *Implementation, Policy, Education, SPMB, Zoning*

ABSTRAK

Kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Jakarta Utara telah menggunakan jalur domisili sebagai upaya dalam pemerataan akses pendidikan, mendekatkan tempat tinggal peserta didik dengan sekolah dan menghilangkan stigma sekolah favorit. Pelaksanaan kebijakan ini berlandaskan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 dan diubah namanya dengan berlandaskan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, Namun masih terdapat kendala dalam proses implementasi kebijakan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan SPMB jalur domisili SMP Negeri di Jakarta Utara dengan Studi Kasus SMPN 143 Jakarta dan mengidentifikasi faktor pendukung serta penghambat implementasi kebijakan ini dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut Grindle serta Van Meter dan Van Horn. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi serta studi literatur melalui sumber data primer dan sekunder serta analisis yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sudah terlaksana namun belum berjalan optimal yang ditandai dengan adanya sebagian masyarakat yang memilih sekolah berdasarkan prestasi akademik sekolah, reputasi sekolah serta fasilitas sekolah. Adapun faktor pendukung dalam implementasi kebijakan ini yakni berkaitan dengan dan sasaran kebijakan, ketersediaan sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana serta sikap para implementor kebijakan. Namun kondisi ekonomi, sosial dan politik dalam masyarakat serta komunikasi antar organisasi yang berkaitan dengan adanya manipulasi data Kartu Keluarga sehingga kurang meratanya Pendidikan sekolah negeri & Kurangnya motivasi belajar siswa yang lulus pada jalur domisili dengan usia yang lebih tua dibanding jalur lainnya. Peneliti merekomendasikan adanya optimalisasi sosialisasi kepada masyarakat, terus mengupayakan perbaikan pendidikan oleh pemerintah setempat bersama dengan sekolah dalam memfasilitasi sarana serta prasarana, sumber daya manusia dan manajemen sekolah.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pendidikan, SPMB, Domisili

PENDAHULUAN

Permasalahan pendidikan terus menjadi masalah yang sangat memprihatinkan di Indonesia, terlebih lagi ketika berbicara mengenai pemerataan pendidikan di daerah-daerah pelosok, dimana hal tersebut membuat adanya perbedaan kualitas antara di daerah perkotaan & pedesaan. Dengan itu, pemerintah memiliki berbagai upaya guna mengatasi masalah tersebut, yakni dengan menggunakan jalur domisili pada proses SPMB, jalur domisili memiliki tujuan guna mempermudah para calon siswa/i yang ingin bersekolah di sekolah yang dituju, dalam artian hal ini juga dapat menghapus julukan sekolah favorit & sekolah yang kurang di kalangan masyarakat

Sistem Penerimaan Murid Baru merupakan langkah awal bagi sekolah untuk dapat mengupayakan pemerataan pendidikan. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021. Pemerintah Indonesia saat ini memfokuskan kebijakan SPMB pada sekolah negeri yang berlandaskan jalur domisili sebagai upaya pemerintah dalam mengurangi adanya jarak pemisah antar sekolah maju, favorit, dan sekolah non favorit.

Pada awalnya, pemerintah melaksanakan sistem PPDB atau SPMB ini hanya berdasarkan zona atau wilayah terdekat saja dari lokasi tempat tinggal calon

siswa/i baru tersebut dan hanya diperuntukkan untuk SMP dan SMA saja, sistem tersebut juga lebih akrab disebut dengan istilah “rayonisasi”, yang di mana sistem tersebut sudah pernah diatur oleh Peraturan Gubernur di Provinsi DKI Jakarta. Jika dilihat lagi, Jalur domisili ini juga diberlakukan untuk anak-anak yang tidak memenuhi standar akademik dan bisa dikatakan kurang mampu guna mendapatkan akses dalam megenyam pendidikan di sekolah yang banyak diminati atau biasa dikenal dengan istilah “sekolah favorit” (Risna, Lisdahlia, and Edi 2020).

PPDB dalam Pasal 1 Ayat 7 pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2019 dituangkan dengan arti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). PPDB atau SPMB ini memiliki tujuan guna mewedahin masyarakat indonesia untuk memperoleh kesempatan dalam megenyam pendidikan yang berkualitas. PPDB atau SPMB ialah sebuah alur utama dalam proses penerimaan siswa/i baru, Juga merupakan proses yang bergerak di bidang pendidikan di sekolah. PPDB atau SPMB dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prinsip good governance dan tidak membeda-bedakan. antara satu dengan yang lainnya. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia No.3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Pasal 3 poin 1. SPMB

dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanda diskriminasi.

Implementasi SPMB di SMPN 143 Jakarta juga berkaitan erat dengan upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui jalur domisili. Dengan jalur ini, diharapkan siswa dapat diterima di sekolah terdekat yang sesuai dengan domisili mereka, sehingga mengurangi beban perjalanan dan meningkatkan partisipasi keluarga dalam pendidikan. Dalam pelaksanaannya, SPMB SMPN 143 Jakarta harus menghadapi berbagai tantangan, seperti kepadatan penduduk yang tinggi, minat masyarakat terhadap sekolah favorit, serta keterbatasan kapasitas ruang kelas. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif dalam penyampaian informasi, pendaftaran, serta penilaian calon siswa agar proses penerimaan berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang optimal.

Perubahan sistem dari PPDB menjadi SPMB pada tahun 2025 merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperbaiki berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam proses penerimaan peserta didik baru. Selama PPDB diterapkan, banyak temuan di lapangan yang menunjukkan bahwa mekanisme tersebut belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat maupun menjawab tantangan

penyelenggaraan pendidikan yang semakin kompleks.

SPMB kemudian diperkenalkan sebagai sistem yang lebih terstruktur, lebih terbuka, dan lebih mudah dipahami. Dalam SPMB, pemerintah memperkuat mekanisme pra-pendaftaran dan memastikan bahwa data siswa yang digunakan berasal dari Dapodik agar lebih akurat. Selain itu, SPMB menekankan keseimbangan antarjalur penerimaan, tidak hanya bergantung pada zonasi. Hal ini memberikan ruang yang lebih luas bagi siswa yang memiliki prestasi akademik maupun nonakademik, serta membuka kesempatan bagi mereka yang berada di luar zona prioritas.

Kegiatan SPMB sudah dilakukan secara online yang artinya semua system telah terintegrasi pada tiap tahapannya yang dapat diakses pada tiap waktu pada masa SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru meliputi sejumlah jenjang Pendidikan pada sekolah negeri yang tersedia, baik ditingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Pada kegiatan SPMB ini tersedia beberapa jalur pendaftaran yaitu:

1. Jalur prestasi
2. Jalur mutasi
3. Jalur afirmasi
4. Jalur domisili

Penerapan jalur domisili berlaku bagi calon siswa yang menetap di wilayah yang

sudah ditentukan oleh pemerintah daerah sebagai zona penerimaan. Letak tempat tinggal calon peserta didik dibuktikan melalui alamat yang tercantum pada kartu keluarga, yang penerbitannya wajib dilakukan paling lambat satu tahun sebelum pelaksanaan SPMB pada tahun berjalan. Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada tiap jenjang Pendidikan oleh pemerintah daerah dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah. Jalur domisili pada satuan Pendidikan, terdiri dari:

- a) Jalur domisili SD dengan paling sedikit 70% dari daya tampung sekolah.
- b) Jalur domisili SMP dengan paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah.
- c) Jalur domisili SMA dengan paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah.

Pada jalur domisili Sistem Penerimaan Murid Baru di SMPN 143 Jakarta Utara mempunyai persyaratan khusus yaitu:

1. Domisili CMB didasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PMB.
2. Nama orang tua/wali CMB yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang Pendidikan sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu

keluarga sebelumnya harus sama dengan nama orang tua sebagai kepala keluarga yang tercantum pada kartu keluarga.

3. Dalam hal terjadi perubahan data Kartu Keluarga karena perpindahan domisili, CMB harus melampirkan Kartu Keluarga yang menunjukkan perpindahan domisili seluruh anggota keluarga lainnya.

Pada pelaksanaan SPMB dengan jalur domisili tahun ini terdapat perubahan aturan dalam proses seleksinya, yaitu menambahkan usia sebagai salah satu syarat utama. Dalam aturan yang baru, calon siswa yang usianya lebih tua akan diprioritaskan untuk diterima terlebih dahulu. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk memberi peluang yang lebih adil bagi siswa yang sebelumnya mungkin terlambat bersekolah atau sempat mengalami hambatan dalam pendidikan pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan cara ini, siswa yang berusia lebih tua tetap bisa melanjutkan sekolah dan tidak tertinggal dari teman-teman seumurannya.

KAJIAN TEORI

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu rangkaian dalam kebijakan publik. Menurut Merilee S. Grindle yang pada dasarnya harus dipenuhi dalam mencapai keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yakni:

1. Urgensi & Skema Pemerintah

Melihat apakah kebijakan yang dibuat sudah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat menyelesaikan masalah yang ada. Selain itu, hal ini juga menilai apakah kebijakan tersebut dibuat oleh lembaga yang memang memiliki wewenang, serta apakah isi kebijakannya sudah sejalan dengan tujuan dan jenis masalah yang ingin diatasi. Proses interaksi antar aktor kebijakan dengan masyarakat yang berintegritas dapat dinilai dari segi akuntabilitas, responsivitas dan transparansi.

2. Kriteria Lembaga

Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesiapan dan kemampuan lembaga yang terlibat. Pihak-pihak yang berperan meliputi pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan, dinas pendidikan sebagai pihak yang mengoordinasikan pelaksanaan, sekolah-sekolah SMP sebagai pelaksana langsung di lapangan, serta lembaga pendukung yang mengurus aspek teknis seperti sistem online dan pengecekan data domisili.

3. Respon Target Sasaran

Setiap kebijakan harus menyesuaikan diri dengan siapa yang menjadi tujuannya agar pelaksanaannya dapat berlangsung sesuai harapan. Dalam

implementasi kebijakan publik, terdapat beberapa komponen utama, yaitu Program atau kebijakan yang akan dilaksanakan, Pelaksana kebijakan, baik lembaga maupun individu yang bertanggung jawab atas proses pelaksanaannya, dan Masyarakat sebagai penerima kebijakan, yang diharapkan dapat merasakan manfaat dari kebijakan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dalam menggambarkan dan memahami Implementasi Kebijakan Jalur Domisili pada Sistem Penerimaan Murid Baru Sekolah Menengah Pertama di SMPN 143 Jakarta Utara. Situs penelitian dilakukan di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Walikota Jakarta Utara dan SMPN 143 Jakarta. Informan terdiri dari Ketua SPMB 2025, Ketua Sub Kelompok Urusan PDPK, Ketua SMP - SMA JU II, Panitia SPMB 2025, Operator SPMB dan Orang Tua Murid Baru. Jenis data yang digunakan bersifat kualitatif dengan sumber data primer berupa wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan hasil observasi lapangan, serta sumber data sekunder berupa jurnal, artikel, situs internet dan sumber lain yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Analisis data dilakukan dengan tahapan menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2023:321), yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kredibilitas data dilakukan melalui triangulasi sumber, cara, dan waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Jalur Domisili pada Sistem Penerimaan Murid Baru Sekolah Menengah Pertama di SMPN 143 Jakarta Utara

Analisis penelitian dilakukan dengan Merilee S. Grindle untuk menganalisa sejauh mana system ini dinilai mampu memenuhi harapan untuk meratakan Pendidikan pada program kebijakann Sistem Penerimaan Murid Baru.

1) Urgensi dan Skema Pemerintah

Implementasi SPMB dilaksanakan sesuai Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 dan Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 Pasal 3 ayat (1), dengan berlandaskan asas objektif, transparan, dan akuntabel serta bertujuan memudahkan akses pendidikan bagi masyarakat.

2) Respon Target Sasaran

Stigma sekolah favorit masih melekat di masyarakat, sehingga pemilihan sekolah cenderung didasarkan pada fasilitas, prestasi, dan reputasi.

3) Kriteria Lembaga

Interaksi dan kerja sama antara pembuat

kebijakan, pelaksana, dan lembaga terkait berjalan baik dalam penyusunan mekanisme penerimaan murid baru.

Faktor Pendorong dan Penghambat Jalur Domisili pada Sistem Penerimaan Murid Baru Sekolah Menengah Pertama di SMPN 143 Jakarta Utara

Ada beberapa faktor pendorong pada Sistem Penerimaan Murid Baru Sekolah Menengah Pertama di SMPN 143 Jakarta Utara, Yaitu:

1) Sasaran dan Tujuan Kebijakan

Implementasi kebijakan didukung oleh regulasi yang jelas dan keberadaan petunjuk teknis yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan, sehingga proses penerapan kebijakan dapat berjalan lebih terarah dan sistematis.

2) Sumber Daya

Implementasi SPMB didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai di tingkat pusat dan sekolah, sarana prasarana pendukung termasuk posko pelayanan, serta dukungan pendanaan melalui dana BOS.

3) Karakteristik Agen Pelaksana

Implementasi SPMB didukung oleh struktur organisasi kepanitiaan yang jelas di tingkat provinsi, kota, dan sekolah, serta pembagian tugas yang terstruktur bagi para pelaksana kebijakan.

4) Disposisi

Setiap implementor memiliki

pemahaman yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih terkoordinasi, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

5) Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi dan koordinasi, adanya rapat yang dilakukan dan pelaporan oleh panitia SPMB pada tingkat sekolah, panitia pada tingkat Kota (Sudin) serta dengan panitia tingkat Provinsi.

Ada beberapa faktor penghambat pada Sistem Penerimaan Murid Baru Sekolah Menengah Pertama di SMPN 143 Jakarta Utara, Yaitu:

1) Komunikasi Antar Organisasi

Sosialisasi SPMB selama ini lebih berfokus pada aspek kewilayahan dan belum mengulas secara mendalam sisi teknis pelaksanaannya. Kondisi tersebut menyebabkan informasi yang diterima masyarakat belum optimal, sehingga masih terdapat warga yang belum memahami prosedur SPMB di Jakarta secara menyeluruh.

2) Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Kelompok masyarakat yang berdomisili jauh dari sekolah serta memiliki usia relatif muda menilai peluang mereka pada SPMB jalur domisili cukup terbatas dan cenderung merugikan. Kondisi tersebut

mendorong sebagian masyarakat melakukan strategi penyesuaian domisili melalui kepemilikan Kartu Keluarga agar lebih dekat dengan sekolah tujuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Implementasi kebijakan SPMB jalur domisili di SMPN 143 Jakarta telah berjalan, namun masih menghadapi kendala persepsi masyarakat terkait keterbatasan pilihan sekolah dan stigma sekolah favorit.

Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh standar dan sasaran, ketersediaan sumber daya, karakteristik serta disposisi pelaksana, dan komunikasi antarorganisasi yang masih terbatas pada aspek kewilayahan, sementara kondisi sosial ekonomi masyarakat belum sepenuhnya mendukung kebijakan tersebut.

SARAN

1. Respons kelompok sasaran menunjukkan bahwa stigma perbedaan kualitas antar sekolah masih kuat. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh agar kesenjangan persepsi masyarakat dapat diminimalkan.
2. Sebagian masyarakat masih merasa terbatas dalam memilih sekolah akibat aturan domisili, yang menunjukkan belum optimalnya pemahaman terhadap

mekanisme SPMB. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih intens agar masyarakat memahami keberadaan jalur lain selain domisili, sehingga pelaksanaan SPMB dapat berjalan lebih lancar.

3. Sosialisasi SPMB masih berfokus pada jalur domisili, sehingga perlu ditingkatkan melalui pelibatan masyarakat dan pemanfaatan media informasi agar peran sekolah sebagai pusat layanan dapat berjalan optimal.
4. Sebagian masyarakat merasa dirugikan oleh seleksi zonasi berbasis domisili dan usia, sehingga diperlukan penyempurnaan penetapan zona dan batas usia agar cakupan zonasi lebih adil serta mengurangi stigma sekolah favorit.

DAFTAR PUSTAKA

Adzim, T I, and N R Herawati. 2022. "Implementasi Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMA Di Kota Semarang Tahun 2021/2022." *Journal of Politic and Government* ...
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/34406%0Ahttps://>

Hariyati, Nunuk, and Elsa Nida Pangaribuan. 2019. "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Smp Di Kabupaten Gresik." *Inspirasi Manajemen Pendidikan* 7(1): 1–12

Hadi, S., Wiyono, G., & Rahim, A. (2022, January). The Impact of the Enrollment Zoning System on the Learning Quality of General Secondary Schools in Special Region of Yogyakarta. In 5th International Conference on Current

Issues in Education.

Agil, Nanggala. 2020. "Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (Mei, 2020)." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8(2): 157–67.
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ejourna>

Iqbal, M., Haris, H., & Niswaty, R. (2021). Implementation of the Zoning System Policy in Bulukumba Regency. *Jurnal Ad'ministrare*, 8(1), 119-128

Alfian, Muhammad Alfian. 2019. "Politik Zonasi Dalam Praktik Pendidikan Di Indonesia." *Politicon : Jurnal Ilmu Politik* 1(2): 117–33.
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/politicon/article/view/6363>.

Ariani, A. T. (2020). The implementation of zoning system in suburban schools in Tulungagung Regency, Indonesia. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 7(2), 183-189.

Risna, Lisdahlia, and Syamsul Edi. 2020. "Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi Dalam Pemerataan Pendidikan." *Mappesona* 2(1): 1.
<https://jurnal.uns.ac.id/candi/article/viewFile/44799/28330>

Kusnandar, V. B. (2021). Lebih dari Sepertiga Penduduk DKI Jakarta Tamat SLTA. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/22/lebihdari-sepertigapenduduk-dki-jakarta-tamat-sлта> pada tanggal 17 Mei 2023

Inang & Sari (2023, Juli 24). Polemik Zonasi PPDB: Mengubah Stigma Sekolah Favorit Menuju Pendidikan yang Berkualitas. Diakses dari <https://www.kompas.com/edu/read/2023/07/24/202559371/polemikzonasippdb-mengubah-stigma-sekolah-favorit-menuju-pendidikanyang?page=all>

Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. (2023). Data Sekolah Provinsi DKI Jakarta. Diakses dari <https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/2/016400>

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

(2024). Sosialisasi PPDB Jakarta Tahun 2024. Diakses dari <https://disdik.jakarta.go.id/article/2720->

[materisosialisasi-ppdb-tahun-2024/](https://disdik.jakarta.go.id/article/2720-materisosialisasi-ppdb-tahun-2024/)